

ANALISIS DISPARITAS KESEJAHTERAAN EKONOMI SUBJEKTIF KELUARGA PETANI DI DAERAH PERDESAAN PROVINSI JAMBI BERDASARKAN AGROEKOLOGI WILAYAH

Suandi, dan Yusma Damayanti

*Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian, Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah: (1) Mengidentifikasi dan mengkaji distribusi tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga petani, dan (2) Mengukur dan menganalisis tingkat disparitas kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga petani di daerah perdesaan Provinsi Jambi berdasarkan agroekologi wilayah. Desain penelitian adalah *cross sectional*. Penelitian dilakukan di Provinsi Jambi: Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengumpulan data berlangsung selama delapan bulan kalender. Jenis atau variabel penelitian adalah kesejahteraan subjektif yaitu melihat tingkat kepuasan keluarga, meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pangan, (2) pemenuhan non pangan, dan (3) pemenuhan kebutuhan investasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara survai terhadap 325 rumahtangga dan dilanjutkan metode *Indepth Interview* terhadap 33 informan dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap beberapa keluarga terpilih dengan jumlah 10 kelompok. Analisis data menggunakan model Kuznets, Kurva Lorenz dan dilanjutkan Uji Mann-Whitney (U-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif (*subjective economic well-being*) di daerah penelitian relatif cukup baik. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase keluarga di wilayah penelitian yang merasa puas dalam pemenuhan keperluan mereka sehari-hari, baik kebutuhan pangan, non pangan maupun pemenuhan kebutuhan investasi relatif memuaskan yaitu mencapai 60,3 persen. Distribusi tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga di daerah penelitian relatif merata karena diperoleh distribusi kesejahteraan ekonomi keluarga antara kelompok terendah dengan kelompok kesejahteraan paling atas relatif merata baik di wilayah pesisir maupun di wilayah pegunungan.

Kata kunci : kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga, disparitas, agroekologi.

PENDAHULUAN

Fakta menunjukkan bahwa perluasan kerjasama sosial politik dunia belum dapat mencegah adanya perbedaan (*disparities*) dan ketidaksamaan (*inequality*) antar negara. Menurut laporan *United Nations* (Santamarina *et al.*, 2002:93), secara moral hal ini merupakan tantangan besar dari waktu ke waktu dan menjadi pemicu berbagai persoalan dalam perencanaan pembangunan masa mendatang. Beberapa ahli memperkirakan, dengan adanya perbedaan dan ketidaksamaan tingkat kesejahteraan masyarakat antar negara di dunia dapat mengakibatkan terjadinya *instabilitas*. Oleh karena itu, PBB yang

disponsori oleh UNDP, mengadakan "Millenium Summit" dengan nama "Millenium Development Goals (MDGs) pada bulan September 2000 yang diikuti oleh 189 negara termasuk Indonesia dengan menghasilkan beberapa komitmen resmi, antara lain: mengurangi deprivasi global yang meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia, khususnya negara-negara berkembang.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumberdaya manusia telah disepakati delapan tujuan pembangunan dengan 12 target dan 48 indikator pembangunan yang harus dicapai pada tahun

2015. Apabila komitmen tersebut dapat dicapai sesuai dengan target yang diharapkan maka negara-negara berkembang pada tahun 2015 dapat hidup sejahtera dan makmur seperti negara-negara maju. Pencapaian indikator utama dapat terlihat dari kemajuan pembangunan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang stabil (Anonim, 2003).

Penduduk Provinsi Jambi, seperti penduduk lainnya di Indonesia, mengelompok sesuai dengan ciri yang dianut, seperti: pola penguasaan lahan, karakteristik sosio-budaya, dan etnisitas sehingga di Provinsi Jambi dikenal dengan tiga kelompok komunitas masyarakat, yakni: masyarakat yang berada pada wilayah dataran rendah; dataran tinggi dan wilayah pasang surut. Wilayah dataran rendah misalnya, didominasi oleh masyarakat Melayu ditambah dengan pendatang (transmigran dari Jawa dan Bali) dengan hasil utama karet dan kelapa sawit. Wilayah pasang surut didominasi oleh masyarakat Bugis dan Banjar (migrasi spontan) dan Melayu dengan komoditas utama hasil perkebunan kelapa dalam, hasil laut dan padi sawah pasang surut, sedangkan di wilayah dataran tinggi didominasi oleh suku Melayu-Kerinci dengan komoditas utama hasil perkebunan kulit manis (*cassia vera*), kopi dan padi sawah irigasi. Keadaan tersebut dapat menyebabkan tingkat *ethnicity* yang cukup beragam antar wilayah di Provinsi Jambi sehingga dapat berpengaruh terhadap *income inequality*, karena *ethnicity* merupakan determinan penting dalam memicu *income inequality* (Easterly, 1999); (Lazear, 1995); (Coppin dan Olsen, 1998) dan (Malan, 2000). Setiap peningkatan sebesar satu unit jumlah kelompok ethnics dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat meningkatkan minimal sebesar 3 persen *income inequality* (Robinson, 2002:8).

MATERI DAN METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Desain penelitian adalah *cross sectional*. Penelitian dilakukan di Provinsi Jambi dengan mengambil dua Kabupaten, yaitu: Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Kerinci. Terpilihnya kedua Kabupaten tersebut sebagai wilayah penelitian dengan pertimbangan diharapkan dapat mewakili karakteristik kabupaten yang ada di Provinsi Jambi baik dilihat dari aspek ekologi, ekonomi maupun sosial budaya. Waktu penelitian selama delapan bulan kalender. Pengumpulan data penelitian dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data atau penelitian penjajakan (uji coba kuesioner). Tahap kedua adalah pengumpulan data primer dan sekunder.

Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari rumahtangga dan keluarga terpilih melalui metode wawancara dengan dipandu daftar pertanyaan (kuesioner) dan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder diperoleh dari instansi dan lembaga terkait disamping dari laporan hasil penelitian, journal maupun majalah yang memuat tentang masalah modal sosial dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Jenis atau variabel penelitian adalah kesejahteraan subjektif yaitu melihat tingkat kepuasan keluarga, meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pangan, (2) pemenuhan non pangan, dan (3) pemenuhan kebutuhan investasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara survai melalui daftar pertanyaan (kuesioner) dan daftar wawancara disamping pengumpulan data secara observasi. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, pengumpulan data dilanjutkan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Indepth Interview* terhadap beberapa keluarga terpilih. Responden keluarga (rumahtangga) diambil *secara simple random sampling* sebanyak 325 orang atau 10 persen dari jumlah rumahtangga yang ada pada masing-masing desa wilayah penelitian. Untuk mengidentifikasi atau melihat tingkat pemerataan kesejahteraan di daerah penelitian diuji menggunakan model Kuznets, Kurva Lorenz, dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney (U-test).

Uji Reliabilitas

Tingkat validitas penelitian salah satunya ditentukan oleh reliabilitas instrumen atau

tingkat konsistensi antar konstruk variabel penelitian. Untuk menguji besar kecilnya nilai reliabilitas instrument penelitian menggunakan tolok ukur nilai *α -cronbach*. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *α -cronbach* penelitian berkisar antara 0,887 – 0,920. Dengan demikian, tingkat reliabilitas antar konstruk variabel penelitian atau informasi yang terjaring cukup dapat diandalkan karena berdasarkan standar nilai paling rendah yaitu sebesar 0,60 (Myers, RH. 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani

Menurut Lokshin dan Ravallion (Strauss, 2004:63), pengertian kesejahteraan dilihat dari dua pendekatan, yakni: kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Noll (Milligan *et al.*, 2006:22), melihat bahwa kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan yang baku (tingkat kesejahteraan masyarakat semuanya dianggap sama), sedangkan kesejahteraan subjektif adalah tingkat kesejahteraan seorang individu yang dilihat secara personal yang diukur

dalam bentuk kepuasan dan kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sumarti, (1999:32) bahwa kesejahteraan subjektif individu atau keluarga adalah wujud kebudayaan yang dihasilkan melalui proses pengalaman hidup sekelompok manusia dalam hubungannya dengan lingkungan (fisik dan sosial). Artinya, pengertian kesejahteraan haruslah berpedoman kepada subjektivitas (lokal) masyarakat setempat. Menurut Angel, Black Well, dan Miniard (Sumarwan, 2003) bahwa kesejahteraan subjektif diukur dalam bentuk kepuasan. Kepuasan atau “*satisfaction is defined here as past consumption evaluation that a chosen alternative at least meets or exceeds expectation*” (kepuasan merupakan hasil evaluasi dari konsumsi yang lalu sehingga alternatif yang dipilih paling tidak

sesuai dengan kriteria atau melebihi kriteria yang diharapkan).

Kesejahteraan Ekonomi Subjektif

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga contoh diperoleh informasi bahwa distribusi tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif (*subjective economic well-being*) di daerah penelitian relatif cukup baik. Hal ini ditandai dengan persentase keluarga di wilayah penelitian yang merasa puas dalam pemenuhan keperluan mereka sehari-hari, baik kebutuhan pangan, non pangan maupun pemenuhan kebutuhan investasi relatif memuaskan yaitu mencapai 60,3 persen. Namun demikian, apabila dibandingkan berdasarkan wilayah agroekologi ternyata persentase terbesar terdapat di wilayah pegunungan yaitu 68,4 persen, sedangkan di wilayah pesisir pantai yang merasa puas dalam pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari hanya sekitar 51 persen (Tabel 1).

Berkenaan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga di wilayah pesisir pantai disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya: faktor fisik/alam, sumberdaya manusia, sumber usaha dan faktor aksesibilitas. Faktor fisik/alam misalnya, bahwa di daerah penelitian mayoritas kesuburan tanah relatif rendah karena umumnya di daerah ini merupakan wilayah pasang surut dengan tanah bergambut. Kemudian, aspek sumberdaya manusia ternyata rata-rata pendidikan masyarakat setempat adalah sekolah dasar kebawah, dan sedikit sekali tamatan sekolah menengah apalagi perguruan tinggi (Anonim, 2007). Kemudian, di wilayah pesisir pantai tingkat aksesibilitas wilayah relatif rendah atau terbatas karena alat transportasi yang umum digunakan adalah transportasi sungai dengan menggunakan perahu tempel/pompong dan *speed boot* dengan tingkat frekuensi perjalanan terbatas.

Namun, tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga atau tingkat kepuasan masyarakat di wilayah pegunungan tergolong cukup baik dan ditandai dengan tingginya persentase responden yang merasa puas atau sangat puas dengan tingkat kesejahteraan

Tabel 1 Sebaran Contoh Menurut Kepuasan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari, Tahun 2009

No	Kepuasan Terhadap pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari	Sebaran Contoh					
		Wilayah pegunungan		Wilayah pesisir pantai		T o t a l	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
01	Sangat Tidak Puas	26	14.9	27	17.9	53	16.3
02	Kurang Puas	29	16.7	47	31.1	76	23.4
03	Merasa Puas	57	32.8	50	33.1	107	32.9
04	Sangat Puas	62	35.6	27	17.9	89	27.4
-	T o t a l	174	100.0	151	100.0	325	100.0

yang dimiliki yaitu mencapai 68,4 persen. Relatif tingginya persentase masyarakat di wilayah pegunungan yang merasa puas dengan tingkat kesejahteraan yang dimiliki dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain: kondisi alam, lapangan kerja, aksesibilitas wilayah dan potensi sumberdaya manusia. Kondisi alam misalnya, oleh karena daerah penelitian berada di daerah pegunungan sehingga kesuburan tanah relatif baik (jenis tanah latosol) dan cukup menguntungkan untuk usaha tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan (Balitbangda Provinsi Jambi, 2006). Seperti diketahui, usaha utama di daerah penelitian adalah usahatani padi sawah, dan perkebunan kulit manis dan kopi disamping itu juga ada usaha tanaman pangan seperti usahatani kentang, cabe, dan pangan lainnya.

Relatif banyaknya cabang usaha masyarakat sehingga membuka peluang berbagai macam lapangan kerja baik dari sektor *off-farm*, seperti: agroindustri (usaha dodol kentang, keripik pisang, anyaman, dan lain-lain), industri rumahtangga (perabot rumahtangga, dan membuat), jasa (transportasi, dan telekomunikasi), perhotelan, maupun sektor lainnya sehingga pada gilirannya akan berdampak kepada penghasilan masyarakat secara menyeluruh. Seperti dikemukakan oleh Mubyarto (1992), faktor lapangan kerja sangat menentukan penghasilan atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian, di wilayah pegunungan tingkat aksesibilitas wilayah relatif cukup baik, seperti transportasi cukup lancar walaupun terbatas pada transportasi darat, dan hampir setiap jam frekuensi perjalanan dari desa ke kota kabupaten dan sebaliknya selalu tersedia. Kemudian, aksesibilitas lain yang sangat

mendukung kelancaran perekonomian daerah yaitu tersedianya sarana penerangan (PLN), air minum (PDAM), dan alat telekomunikasi. Sehubungan alat telekomunikasi, hasil observasi dan pengamatan lapangan bahwa di wilayah pegunungan pada saat melakukan penelitian diketahui hampir di setiap ibu kota kecamatan telah ada “*tower telekomunikasi*” dari berbagai macam cabang (indosat, telkomsel, dan lain-lain). Dengan arti kata, di daerah ini hampir di setiap desa sudah bisa menggunakan jasa telekomunikasi seperti layaknya di daerah perkotaan.

Kepuasan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Kepuasan keluarga contoh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dikaji dalam dua aspek yakni: aspek frekuensi makan setiap hari dan keragaman pangan yang dikonsumsi keluarga. Melalui dua pendekatan ini diharapkan keperluan pangan anggota keluarga yang ada di daerah penelitian terpenuhi dari segi kecukupan akan zat gizi yang diperlukan. Seperti tertera pada Tabel 2, proporsi terbesar (61 %) keluarga contoh di daerah penelitian merasa puas dalam konsumsi pangan. Apabila dikelompokkan berdasar daerah penelitian ternyata masyarakat yang paling banyak merasa puas dalam penyediaan konsumsi pangan terdapat di daerah pegunungan (72 %), sedangkan di daerah pesisir pantai yang merasa puas hanya sekitar 49 persen. Hasil analisis menunjukkan bahwa frekuensi makan keluarga responden di daerah penelitian relatif terpenuhi. Persentase masyarakat pada golongan ini mencapai 80 persen lebih menyatakan bahwa mereka biasa makan setiap hari tiga kali dengan menu makanan cukup

beragam yaitu makan nasi dengan lauk pauk (bergantian antara daging, ayam dan ikan), sayur dan pangan lainnya.

Kepuasan terhadap Pemenuhan Non Pangan

Pemenuhan kebutuhan non pangan diukur dari pemenuhan akan sandang atau pakaian, papan/perumahan, energi dan komunikasi ditambah dengan pemenuhan kebutuhan sosial. Pemenuhan sandang misalnya walaupun bukan merupakan kecukupan dasar tetapi ia sangat diperlukan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat pemenuhan kebutuhan sandang ini sangat penting diperhatikan. Begitu juga kecukupan akan perumahan dan energi serta alat komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi keluarga dengan tingkat pemenuhan kebutuhan non pangan cukup baik (merasa puas dan sangat puas) mencapai 52 persen. Namun, proporsi keluarga dengan persentase yang merasa puas dan sangat puas dalam konsumsi non pangan lebih kecil dibandingkan dengan persentase keluarga yang merasa puas dan sangat puas dalam konsumsi pangan.

Apabila dibedakan berdasarkan wilayah agroekologi ternyata persentase terbesar (59,8 %) yang merasa puas dan sangat puas terhadap pemenuhan kebutuhan non pangan terdapat di wilayah pegunungan, sedangkan di wilayah pesisir pantai hanya 42,4 persen. Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa relatif rendahnya persentase masyarakat di wilayah pesisir pantai yang merasa puas dan sangat puas terhadap pemenuhan kecukupan non pangan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: harga non pangan, seperti pakaian yang ditawarkan dipasaran relatif mahal, terbatasnya pasar karena terbatasnya aksesibilitas jalan, dan faktor selera namun demikian, di daerah ini banyak ditemui pasaran pakaian-pakaian bekas.

Bagian lain dari pemenuhan kebutuhan non pangan yaitu kepuasan dalam kegiatan sosial. Sikap sosial merupakan kebutuhan pribadi masing-masing responden yang sulit diukur secara kuantitatif namun kepuasan ini bisa dilihat dari (kontribusi) yang diberikan keluarga responden dalam berbagai kegiatan

sosial masyarakat baik kegiatan yang disponsori oleh pemerintah, misalnya kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan kegiatan lainnya maupun kegiatan sosial budaya masyarakat dan agama, seperti kegiatan acara adat, dan kegiatan-kegiatan hari besar agama terutama hari besar agama islam. Besar kecilnya kontribusi untuk kegiatan sosial merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan dan status seseorang dalam masyarakat. Secara terdapat 50 persen lebih responden merasa puas dan sangat puas. Apabila dibedakan berdasarkan daerah penelitian tampaknya persentase terbesar masih terdapat di wilayah pegunungan yaitu 60 persen, sedangkan di wilayah pesisir pantai sekitar 51 persen. Relatif besarnya proporsi responden dengan kegiatan sosial di wilayah pegunungan menurut pengamatan peneliti adalah wajar disamping kepedulian sosial masyarakat yang relatif tinggi juga disebabkan oleh intensitas kegiatan sosial masyarakat relatif lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan sosial di wilayah pesisir pantai.

Kepuasan terhadap Pemenuhan Investasi Sumberdaya Manusia

Pemenuhan kebutuhan investasi sumberdaya manusia dibagi dalam dua kelompok yaitu pemenuhan kebutuhan terhadap biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan misalnya, sangat penting sekali untuk pembangunan sumberdaya manusia masa akan datang. Oleh karena itu, investasi dibidang pendidikan adalah mutlak demi masa depan terutama anak-anak usia sekolah. Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak usia sekolah ini dilihat dari tingkat kebutuhan biaya yang diperlukan oleh anak didik baik keperluan yang bersifat wajib, seperti SPP, uang pembangunan sekolah, biaya OSIS, maupun keperluan lainnya, seperti: buku teks, biaya transpor, dan uang jajan.

Kepuasan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, melalui hasil wawancara diperoleh informasi bahwa rata-rata tingkat pemenuhan kecukupan investasi keluarga di daerah penelitian baru dirasakan oleh sebagian kecil responden (45,9 persen) dan lebih kecil

dibandingkan dengan persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan bagi masyarakat disamping terbatasnya penghasilan yang dimiliki. Apabila dibedakan berdasarkan daerah penelitian ternyata persentase terbesar yang merasa puas dan sangat puas terhadap pemenuhan investasi sumberdaya manusia terdapat di wilayah pegunungan yaitu mencapai 53,5 persen, sedangkan di wilayah pesisir pantai hanya 37,1 persen.

Dari kedua pemenuhan kebutuhan investasi tersebut, persentase responden yang merasa puas dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan baru mencapai 43 persen. Artinya, di daerah penelitian masih banyak yang belum merasa puas terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan. Berdasarkan wilayah penelitian tampaknya pemenuhan kebutuhan yang paling rendah terdapat di wilayah pesisir pantai yaitu hanya 33 persen, sedangkan pemenuhan kebutuhan pendidikan di wilayah pegunungan sudah mencapai 51 persen. Hal ini merupakan pemikiran serius oleh pemerintah setempat untuk kemajuan pembangunan daerah kedepan. Dengan arti kata, pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat terutama anak usia sekolah perlu dimasukkan sebagai prioritas pembangunan disamping pembangunan fisik dan infrastruktur lainnya. Dan lain halnya dengan investasi untuk kesehatan, data menunjukkan bahwa rata-rata investasi keluarga untuk kesehatan relatif lebih tinggi walaupun masih lebih rendah dari pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan yaitu sekitar 48 persen. Apabila dirinci berdasarkan alokasi kecukupan sehari-hari keluarga, tampaknya distribusi kepuasan pemenuhan kecukupan keluarga di wilayah penelitian juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara keluarga yang berada

di wilayah pesisir dengan keluarga yang berada di wilayah pegunungan (Tabel 2). Artinya, rata-rata proporsi keluarga contoh dengan tingkat kepuasan tinggi yang berada di wilayah pegunungan adalah relatif besar dibandingkan dengan keluarga contoh yang berada di wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan ekonomi objektif (proksi pengeluaran) tidak selalu menentukan tingkat kepuasan keluarga di daerah penelitian.

Disparitas Kesejahteraan Ekonomi Subjektif

Pengukuran disparitas dalam ilmu ekonomi yaitu mengukur pembagian pemerataan suatu kelompok masyarakat. Pengukuran disparitas dapat menggunakan pendekatan pemerataan pengeluaran/kesejahteraan, melalui: pengeluaran individu, wilayah, maupun pengeluaran sektoral (Cowell: Arbia Giuseppe, *et al.* 2005:9). Salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah model Kuznets (Arbia Giuseppe *et al.* 2005:12).

Model Kuznets melihat pemerataan pengeluaran berdasarkan perbandingan pengeluaran dari 40 persen kelompok penerima pengeluaran terbawah dibandingkan dengan 10 persen kelompok penerima pengeluaran teratas. Pengeluaran keluarga dikatakan merata atau hampir merata apabila nilai dari kelompok penerima pengeluaran 40 persen terbawah lebih besar dari 17 persen, 12-17 persen dikatakan kurang merata (ketidakmerataan sedang), dan di bawah 12 persen disebut sebagai kelompok tidak merata (ketidakmerataan tinggi). Perlu disampaikan, model Kuznets ini telah teruji baik di negara maju maupun negara berkembang. Dengan arti kata, model ini tidak terbatas pada pola pengeluaran atau pendapatan tertentu saja. Pengukuran disparitas kesejahteraan ekonomi

Tabel 2 Persentase Contoh Merasa Puas Terhadap Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Sehari-hari, 2009

No	Kepuasan Terhadap Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Sehari-hari	Sebaran Contoh (%)		
		Wilayah pegunungan	Wilayah pesisir pantai	Rata-rata
01	Pemenuhan kebutuhan pangan	72,5	49,7	61,1
02	Pemenuhan kebutuhan Non pangan	59,5	42,6	51,1
03	Pemenuhan kebutuhan investasi	53,4	37,4	45,4
-	Rata-rata	61,8	43,2	52,5

Tabel 3 Indeks Kuznets Tingkat Kepuasan Keluarga

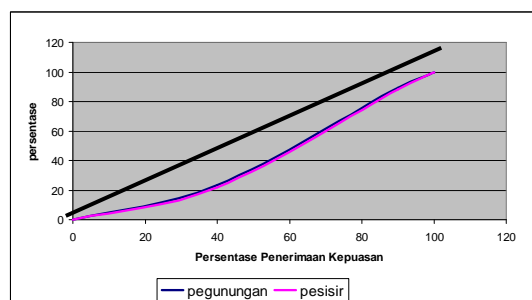
No	Nilai Pembatas	Wilayah pegunungan (n=174)	Wilayah pesisir pantai (n=151)
01	40 % penerima kepuasan terbawah	$(139,66/599) \times 100 = 23,32$	$(106,52/492) \times 100 = 21,65$
02	10 % penerima kepuasan teratas	$(62,28/599) \times 100 = 10,4$	$(54,83/492) \times 100 = 11,4$
03	Bobot Ketidaksamarataan (BK)	2,24	1,9

subjektif, seperti halnya pengukuran disparitas kesejahteraan ekonomi objektif yaitu menggunakan Model Kuznets dan Kurva Lorenz. Model ini mengukur pembagian pemerataan tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga pada kelompok penerima kepuasan terbawah dengan kelompok penerima kepuasan teratas. Dengan kata lain, melihat pemerataan kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga berdasarkan perbandingan tingkat kepuasan dari 40 persen kelompok penerima kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga terbawah dibandingkan dengan 10 persen kelompok penerima tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga teratas.

Berdasarkan data yang tersedia dan alat uji yang digunakan, maka diperoleh hasil distribusi kepuasan keluarga di daerah penelitian baik tingkat kepuasan keluarga di wilayah pesisir pantai maupun di wilayah pegunungan ternyata memiliki tingkat distribusi kepuasan keluarga cukup merata. Seperti tertera pada Tabel 3, diperoleh hasil bahwa kelompok 40 persen penerima kepuasan terbawah rata-rata di atas 17 persen. Sebaliknya, distribusi penghasilan 10 persen kelompok penerima kepuasan teratas dengan nilai juga cukup baik yaitu di bawah 17 persen.

Analisis berikut dari perhitungan perbandingan antara 40 persen kelompok penerima kepuasan terbawah dengan 10 persen kelompok penerima kepuasan teratas yaitu dengan uji Bobot Kesenjangan (BK). Hasil perhitungan diperoleh bahwa kedua wilayah penelitian menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan dengan nilai berkisar antara 2,24–1,9. Apabila merujuk kepada standar yang digunakan oleh Bank Dunia dan Kuznets maka distribusi kepuasan keluarga di kedua wilayah penelitian tergolong merata

walaupun nilai dari BK ini tidak mencapai 4 tetapi jauh lebih besar dari angka 0,3.



Gambar 1 Kurva Lorenz Tingkat Kepuasan Keluarga

Sebagai tindak lanjut pengukuran distribusi kepuasan keluarga, seperti halnya dengan pengukuran pengeluaran dilanjutkan dengan pengukuran melalui Kurva Lorenz. Seperti tertera pada Gambar 1, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi kepuasan keluarga di daerah penelitian tampaknya tidak jauh berbeda dengan tingkat distribusi penghasilan dan pengeluaran keluarga yaitu relatif merata baik keluarga yang berada di wilayah pesisir maupun di wilayah pegunungan, distribusi kepuasan keluarga cukup merata karena kurva lorenz yang terlukis hampir mendekati kurva kesamarataan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan kepuasan di kedua wilayah penelitian hampir mendekati sempurna karena nilai pembatas, yakni: distribusi penerima kepuasan 40 persen ter bawah memiliki slop yang relatif kecil dengan nilai di atas batas standar yaitu di atas 17 persen, dan begitu juga distribusi penerimaan kepuasan 10 persen teratas relatif berimbang dengan 40 persen penerima kepuasan terendah. Namun demikian, melalui uji model Mann-Whitney (U-test) dapat diketahui bahwa tingkat

kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga di wilayah pegunungan relatif lebih merata dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga di wilayah pesisir pantai dengan nilai z-skor masing-masing wilayah -14,6 dan 7,5 ($Z_{table} = 4,05$). Menurut Gradstein Mark (2007:266), semakin merata distribusi kesejahteraan masyarakat maka tingkat demokratisasi semakin baik. Dengan arti kata, tingkat keharmonisan dan kekeluargaan masyarakat semakin kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Distribusi tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif (*subjective economic well-being*) di daerah penelitian relatif cukup baik. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase keluarga di wilayah penelitian yang merasa puas dalam pemenuhan keperluan mereka sehari-hari, baik kebutuhan pangan, non pangan maupun pemenuhan kebutuhan investasi relatif memuaskan yaitu mencapai 60,3 persen. Proporsi pemenuhan kebutuhan pangan sebesar 61 persen, non pangan 52 persen, dan pemenuhan kebutuhan investasi sumberdaya manusia baru mencapai 45,9 persen. Berdasarkan wilayah agroekologi, ternyata persentase tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif terbesar terdapat di wilayah pegunungan yaitu 68,4 persen, sedangkan di wilayah pesisir pantai yang merasa puas dalam pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari hanya sekitar 51 persen.
2. Distribusi tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga di daerah penelitian relatif merata karena diperoleh distribusi kesejahteraan ekonomi keluarga antara kelompok terendah dengan kelompok kesejahteraan paling atas relatif merata baik di wilayah pesisir maupun di wilayah pegunungan. Namun demikian, tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga yang berada di wilayah pegunungan relatif lebih merata dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan yang berada di wilayah pesisir pantai.

Saran

1. Perlu penelitian lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga di wilayah perdesaan terutama yang dapat mendukung dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga secara struktural dan holistik.
2. Perlu perhatian pemerintah menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia di wilayah perdesaan terutama dalam pengembangan program wajib belajar melalui subsidi pendidikan.
3. Hasil penelitian ini belum mampu mengungkapkan tingkat disparitas dan ketidaksamarataan kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan agroekologi wilayah di daerah perdesaan maka perlu penelitian lebih mendalam tentang keterkaitan distribusi kesejahteraan ekonomi keluarga di daerah perdesaan dengan memasukkan variabel jumlah anggota keluarga dan mata pencaharian utama masyarakat sebagai *confounding factor*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. Millenium Development Goals (MDGs): In Asia and the Facific. Meeting the Chalenger of Poverty Reduction. New York: United Nations.
- _____. 2007. "Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka". Muara Sabak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Arbia Giuseppe, Laura de Dominics, dan Gianfranco Piras. 2005. The Relationship between Regional Growth and Regional Inequality in EU and Transition Countries: a Spatial Econometric Approach. In preparation for the Workshop of Spatial Econometrics, Kiel, April 8-9, 2005. Amsterdam: Departemen of Spatial Economics, Free University, De Boelelaan 1105, 1081HV, Netherlands. E-mail: Idedominicis@feweb.vu.nl

- Balitbangda Provinsi Jambi] Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi . 2003. "Evaluasi Kebutuhan Penempatan Transmigrasi di Provinsi Jambi." Jambi: Balitbangda Provinsi Jambi.
- Gradstein, Mark. 2007. "Inequality, Democracy and the Protection of Property Rights." *The Economic Journal*, 117 (January) 252-269. America: Blacwell Publisng, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Guhardja S, Hidayat S, Hartoyo, dan Herien P. 1992. *Pengembangan Sumberdaya Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Mubyarto. 1992. *Menanggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Milligan Sue, Fabian Angela, Coope Pat, dan Errington Chris. 2006. *Family Wellbeing Indicators from the 1981-2001 New Zealand Cencuses*. New Zealand: Published in June 2006 by Statistics New Zealand in Conjunction with The University of Auckland and University of Otago. 2006, ISBN 0-478-26982-X.
- Myers, RH. 1990. *Classical and Modern Regression with Applications*. Boston: Second Edition. PWS-KENT Publishing Company.
- Robinson, Brooks B. 2002. *Income Inequality and Ethnicity: An International View*. Washington: Second Inequality and Pro-Poor Growth Spring Conference the World Bank, Washington DC, June, 9-10, 2002.
- Strauss, John, Kathleen Beegle, Agus Dwiyanto, Yulia Herawati, Daan Pattinasarany, Elan Satriawan, Bondan Sikoki, Sukamdi, dan Firman Witoelar, 2004. *Indonesian Living Standards: Before and After the Financial Crisis*. RAND Corporation, Santa Monica, USA, and Institute of Southeast-Asian Studies, Singapore.
- Sumarti, Titik MC. 1999. "Persepsi Kesejahteraan dan Tindakan Kolektif Orang Jawa dalam kaitannya dengan gerakan Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera di Pedesaan." Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sumarwan, Ujang. 2003. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

